

Wabup Pimpin Safari Jumat di Tempel



Wabup Danang Maharsa menyerahkan administrasi kependudukan.

SLEMAN (KR) - Tim Safari Jumat Pemkab Sleman kembali melakukan Safari Jumat di Masjid Al Furqon Bandung Kulon Tambakrejo Tempel, Jumat (17/3). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekda Harda Kiswaya, serta beberapa Kepala OPD.

Menurut Danang, kegiatan ini salah satunya bertujuan agar stakeholder dari Pemkab Sleman dapat mengetahui langsung kondisi dan

situasi yang ada di masyarakat. "Komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus selalu kita jalin dan tingkatkan," ujarnya.

Dalam safari tersebut juga diserahkan bantuan kepada takmir Masjid Al Furqon senilai Rp 22,5 juta. Bantuan ini terkumpul dari beberapa pihak, di antaranya Pemkab Sleman, Baznas Sleman, infak, Bank Sleman, Bank BPD DIY, PDAM, dan RSUD Sleman.

Wakil Bupati Danang juga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan dari Dinas Dukcapil Sleman. Di antaranya 7 akta kelahiran, 32 akta kematian, 52 Kartu Keluarga, 17 KTPel, dan 22 Kartu Identitas Anak. **(Has)-f**

Faber-Castell, Kampanyekan Guru Kreatif

SLEMAN (KR) - Peranan guru sebagai motor pendidikan di Indonesia sangatlah penting. Melihat peranan tersebut, Faber-Castell tahun ini kembali mengajak para guru berpartisipasi memamerkan keseruannya dalam menggambar dan mewarnai



Guru-guru saat mengikuti 'Teacher Competition 2023'.

melalui kegiatan Teacher Competitions.

"Kegiatan ini berlangsung sejak Januari hingga April 2023 di seluruh Indonesia dengan mengangkat tema 'Indonesia Kreatif, Indonesia Maju'. Untuk DIY kegiatan diadakan di Sleman City Hall (SCH), Kamis (16/3)," kata Product Manager Faber-Castell International Indonesia Richard Panelewen di Sleman, Jumat (17/3).

Richard menjelaskan, tema 'Indonesia Kreatif, Indonesia Maju' diambil untuk memberikan semangat para guru terus berkarya. Guru yang kreatif tentu akan turut melahirkan generasi muda Indonesia sebagai generasi kreatif, dan akhirnya menjadi bagian semangat Indonesia sebagai negara yang maju sesuai visi Indonesia 2045.

Dalam kegiatan 'Teacher Competition 2023' juara 1 diraih Santy Roosita Pertiwi dari TK Teladan, juara 2 diraih Fransisca Dwi Septiana SSI (AHE Yogyakarta) dan juara 3 diraih Ngatino (SD Sidoasih). **(Ria)-f**

'SIGNAL WEEKENDERS' DIGELAR DI JEC
Bayar Pajak Kendaraan Lebih Mudah dengan Signal

BANTUL (KR) - Masyarakat saat ini bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Program ini merupakan terobosan dari tiga instansi yaitu Polri (Korlantas Polri), Kemendagri (Bapenda) dan PT Jasa Raharja.

Aplikasi ini diluncurkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan proses layanan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ) secara digital.

Dalam launching kegiatan 'Signal Weekenders' yang diselenggarakan pada 17-19 Maret 2023 di Jogja Expo Center (JEC), Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurrisal, menjelaskan pihaknya meyakinkan masyarakat dengan adanya Signal ini bakal diberi kemudahan, aman dan nyaman.

"Pembayaran pajak yang dilayani adalah pajak tahunan, baik yang domisili di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Dalam signal juga memberikan kemudahan dalam editifikasi, juga terdapat registrasi balik nama. Dengan layanan ini dipastikan akan mempermudah editifikasi dan verifikasi. Terlebih adanya VR dan kerja sama dengan Dukcapil pula," tuturnya.

Kombes Alfian juga menyampaikan untuk pajak



Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).

lima tahunan terdapat program Samoli, Samsat Mobil Lima Tahunan yang sudah berjalan kurang lebih 5 minggu di daerah Yogyakarta.

"Masyarakat bisa membawa kendaraannya, yang nantinya akan dilakukan cek rangka mesin dan lainnya di layanan mobile tersebut," jelas Alfian.

PELUNCURAN DESA BEBAS STUNTING

Fokus Peningkatan SDM Kesehatan

BANTUL (KR) - Dana desa prioritas untuk 2 hal yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan SDM erat hubungannya dengan kesehatan. Terkait kesehatan, yang sekarang gencar dilakukan adalah penanganan stunting di kota maupun desa.

Hal ini ditegaskan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), Abdul Halim Iskandar MPd, saat peluncuran Desa Bebas Stunting Award 2023 di Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul, Kamis (16/3) malam.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam momentum



Abdul Halim Iskandar MPd (tengah) meluncurkan Desa Bebas Stunting dengan Salam BKKBN.

Lokakarya Nasional Praktik Baik Desa Bebas Stunting yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes). Hadir dan memberi sambutan Ketua Umum Adinkes dr

itu untuk apa? Jawaban saya simpel. Dana desa untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, termasuk kesehatan, khususnya stunting," ujarnya.

Sedangkan dr Hasto Wardoyo SpOG(K) mengungkapkan sinergi lintas sektoral dalam penanggulangan stunting serta pentingnya gerakan desa bebas stunting sangat penting. "Penanganan stunting BKKBN tidak sendirian, banyak instansi yang membantu serta mengawalinya. Seperti Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia/Adinkes ikut berperan serta untuk mengawal program Desa Bebas Stunting," ujarnya. **(Jay)-f**

PENDUDUK WAJIB MEMILIKI ADMINDUK
Syarat Mendapatkan Akses Pelayanan Publik



Sudaryanto SH menyampaikan sosialisasi.

SLEMAN (KR) - Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY bersama DPRD DIY terus menyosialisasikan terkait Aturan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kali ini dilaksanakan di aula kantor Kalurahan Tridadi Sleman, Kamis (16/3) diikuti Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Tata Laksana se-Kapanewon Sleman, Tim Penggerak PKK dan Ketua RW se-Kapanewon Sleman.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Anggota Komisi A DPRD DIY Sudaryanto SH dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman Theresia Okti Herawati SH dipandu moderator Kepala Bagian Bina Adminduk dan Catatan Sipil, Biro Tapem Setda DIY, Rokhani Yuliyanti SH. Hadir pula Lurah Tridadi Sri Hartati dan Panewu Anom Kapanewon Sleman Tri Akhmeriyadi.

Sudaryanto mengata-



Dukuh di Kapanewon Gamping fokus mengikuti sosialisasi di Kantor Kapanewon Gamping.

kan, administrasi kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius karena merupakan hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam pembangunan. Adanya adminduk yang dikelola dengan baik akan berdampak pada pemberian pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, bahkan untuk lingkup yang lebih besar yaitu perencanaan pembangunan nasional.

Menurut Sudaryanto, pertambahan penduduk akibat migrasi, kelahiran, kematian maupun mobilitas penduduk yang cukup tinggi di DIY, tidak jarang menyebabkan permasalahan administrasi kependudukan, sebut saja misalnya masalah KTP ganda. "Pengkondisian penduduk agar memiliki dokumen kependudukan sangat penting, sebagai prasyarat untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Karena dokumen adminduk merupakan alat bukti otentik, sehingga wajib dimiliki oleh setiap penduduk," katanya.

Sudaryanto menuturkan, peran instansi pemerintah yang terintegrasi antar lembaga dalam hal pelayanan publik, termasuk dalam hal penyelenggaraan adminduk dan pengelolaan data kependudukan, mutlak dibutuhkan, baik dalam bentuk tatatan, kebijakan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Theresia Okti Herawati menyampaikan tentang penyelenggaraan Adminduk dan Capil di Kalurahan Tridadi. Seperti jumlah penduduk, jumlah KK, jumlah pendudukan yang sudah memiliki KTP Elektronik, jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) dan jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran. Herawati juga menjelaskan tentang prosedur aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dimulai dengan unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Playstore. Registrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat e-mail, dan nomor HP. Swafoto/selfie untuk verifikasi data. Scan barcode yang akan dipandu oleh petugas aplikasi SIAK Dinas Dukcapil atau Kapanewon. Cek kode pin melalui e-mail untuk aktivasi dan login pada aplikasi.

Selain itu dijelaskan pula permasalahan-permasalahan adminduk, seperti Pemilihan Dokumen Kependudukan di mana tidak memiliki sesuai aturan terbaru: sakit berat, lansia, penyandang disabilitas, ODGJ,



Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satya Rahayu (dua dari kanan) saat memaparkan materi.



Theresia Okti Herawati menyampaikan paparan.

terlantar. Memiliki tetapi tidak sesuai yang sebenarnya, tidak lengkap, berbeda-beda. Memiliki tetapi tidak sesuai domisilinya.

Sedangkan masalah di Data Administrasi Kependudukan seperti masih ada penduduk yang tidak tercatat. Data dikumpulkan, diolah, disajikan masing-masing instansi/lembaga, sehingga seringkali berbeda-beda. Adapun permasalahan di Pengelolaan Dokumen dan Arsip Kependudukan seperti belum tertata dengan baik.

Herawati menyampaikan inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Dukcapil Sleman. Antara lain inovasi pelayanan 'Idola' singkatan dari Integrasi Dokumen Layanan Akta. Ini merupakan pelayanan dokumen yang terintegrasi, yaitu permohonan akta kelahiran sekaligus diberikan KK, KIA kependudukan baru. Permo-

honan akta kematian diberikan juga KK, KTP Elektronik bagi suami/istri yg masih hidup. Permohonan akta diberikan KK, KTP Elektronik perkawinan. Sosialisasi pun dilakukan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY bersama DPRD DIY di Kantor Kapanewon Gamping,

Sleman dengan melibatkan dukuh-dukuh di Kapanewon Gamping, Jumat (17/3) kemarin. Hal ini dilakukan untuk memacu dukuh untuk melakukan sosialisasi pada warganya untuk dapat tertib dalam administrasi kependudukan. Hadir sebagai narasumber, Anggota

Komisi A DPRD DIY, Yuni Satya Rahayu serta Mayawati Jati Lestari selaku Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sleman serta Panewu Gamping. Yuni Satya Rahayu, Anggota Komisi A DPRD DIY menegaskan kelengkapan administrasi kependudukan begitu penting, tak hanya bagi orang dewasa namun juga bagi anak-anak dengan KIA. Dukuh pun harus berperan untuk memastikan warganya memiliki seluruh kelengkapan tersebut. "Ada kartu KIA, perlu dicek sudah memiliki atau belum. Pak Dukuh ini pelaku di lapangan. Administrasi kependudukan ini penting," tegas Yuni Satya Rahayu. Ia menambahkan, Perda No 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak mungkin sudah tak begitu relevan dengan kondisi saat ini dan perlu direvisi, masyarakat bisa mengusulkan hal tersebut. "Memperbarui Perda 9 Tahun 2015, jika memang perlu direvisi bisa disampaikan. Malalui Biro Hukum agar bisa dibahas tahun 2024 atau 2025 mendatang," tambah Yuni. Sementara itu, Mayawati Jati Lestari selaku Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sleman mengatakan Disdukcapil Sleman akan melakukan percepatan untuk pembuatan surat kematian setelah Bulan Suci Ramadan. Sebab dari data, saat ini ada 11 ribu yang belum dibuatkan surat kematian. **(Dev/Yud)**



Sosialisasi aturan Adminduk dan KIA di Aula Kantor Kalurahan Tridadi Sleman.